PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I KETUT SUDIANA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, HUBUNGAN MASYARAKAT**
3. NHK : **812688**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.970.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 75.050.000

1. MOBIL, TOYOTA GREAT COROLLA Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMMNY Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000
5. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.250.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	458.919.799
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.503.969.799
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.503.969.799

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.